

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO
HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Oleh:

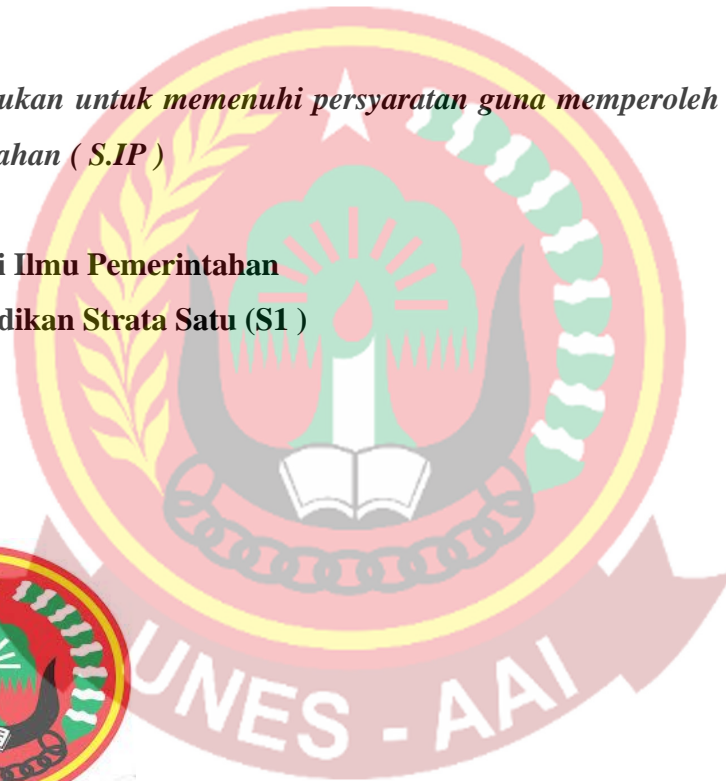
PUJA PERMATA SARI

NO.BP : 1810003829012

*Jurnal ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ilmu Pemerintahan (S.IP)*

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS EKASAKTI-AAI PADANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS EKASAKTI

PADANG

2022

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

PUJA PERMATA SARI
BP : 1810003829012
E-mail : permatasaripuja06@gmail.com

Abstrak : Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak dapat dipisahkan dengan APBDDes. Karena ADD merupakan Komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaan, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang pengelolaan ADD termuat dalam permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hile. (2) Apa kendala yang yang dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie. (3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie. Metode yang di gunakan dalam penilitian ini adalah Metode Kualitatif tipe deskriptif. Adapun proses penentuan sampel datanya dengan menggunakan metode purpose sampling dengan teknik non random sampling. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data kemudian penyajian data hingga kesimpulan. Hasil analisis dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : (1) Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie secara normatif dan admistratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung- jawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. (2) Kendala yang terjadi dalam hal budaya parternalistik dimana masyarakat hanya mengandalkan semuanya kepada kepala kampung dimana masyarakat tidak mau mengetahui tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Ada Dalam Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, tanpa mau terlibat mengenai pengelolaan alokasi dana desa (3). Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Desa yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Wujud dari pemberdayaan lingkungan hanya berupa pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan sesungguhnya yaitu upaya untuk perawatan dan pelestarian lingkungan. Sedangkan wujud dari pemberdayaan manusia berupa biaya operasional untuk pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan pemberdayaan wanita melalui PKK

Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.¹ Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional

Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum tidak dapat dipisahkan dengan APBDes. Karena merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam Pengelolaan, pemerintahan desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang pengelolaan ADD terumut dalam permendagri No.133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara umum tahap perencanaan dilaksanakan pada tahun sebelumnya, yakni akhir tahun 2016. Sedangkan tahap pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pesisir Selatan di atur oleh Bupati Pesisir Selatan Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 99 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa.

Sebelum menerima transfer dana dari pemerintah kabupaten, desa haruslah merencanakan terlebih dahulu apa yang akan dibelanjakan, apa yang akan dilakukan dengan dana tersebut. Dalam perencanaan tersebut, baiknya aparaturnya melibatkan semua masyarakat untuk menentukan rencana pembangunan dan pembelanjaan tersebut. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa juga harus dilaporkan dan

¹ H.A Rosid, 2002, *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah*, dalam Yaya M. Abdul Aziz dan Ade priangani (eds.), *Titik Balik Demokrasi dan Otonomi Pikiran-Pikiran Krisis di Saat Krisis*, Yogyakarta: Pustaka Raja,hal..26

dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.² Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie ini difokuskan pada penerapan prinsip Pengelolaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie terdapat Di Kenagarian Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie masyarakat cukup berpartisipasi kepada kepemimpinan termasuk kepemimpinan dari Wali Nagari, hal itu karena di Kenagarian ini masyarakat masih memiliki jiwa social yang sangat tinggi, dan di sana masyarakat masih ikut andil dalam kemajuan Nagari mereka. Masyarakat disana masih memiliki system kekerabatan yang tinggi seperti masih ada disana istilah *Dunsanak*. *Dunsanak* disini diartikan masyarakat disana memiliki suku masing-masing, dan tiap-tiap suku memiliki kepala suku masing-masing yang dikenal disana sebagai *Ninik Mamak*, Namun meski tiap masyarakat memiliki suku masing-masing, mereka selalu kompak dan tidak saling membedakan antara satu suku dengan suku lainnya, mereka selalu kompak dan saling bekerjasama.

Begitupun dalam bidang pemerintahan, setiap masyarakat selalu berpartisipasi demi kemajuan Nagari mereka. Masyarakat untuk selalu memperhatikan kepemimpinan yang sedang dijalani oleh Wali Nagari mereka, berbagai macam kritik dan saran selalu mereka ajukan kepada Wali Nagari mereka, namun karena pendapat dari mereka tentu berbeda-beda sehingga sering menyebabkan berbagai macam konflik, hal itu didasari oleh jenjang pendidikan, gaya hidup, status social dan masih banyak faktor lainnya, terkadang sangat sulit mengatasi masyarakat yang asal kritik saja tanpa alasan yang tidak begitu jelas, Wali Nagari Lakitan Tengah terkadang seringkali dibuat bingung dengan kritik yang masyarakat sampaikan, hal itu karena masyarakat seringkali mencampurkan urusan pribadi, pendidikan dengan urusan pemerintahan.

² [http://www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklaktbimkonkeude sa.pdf](http://www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklaktbimkonkeude%20sa.pdf). diakses tanggal 10 Oktober 2021.

Tentu hal ini sangat berbeda, masing-masing dari semuanya memiliki penanggung jawab masing-masing, seperti dalam bidang pendidikan, masalah beasiswa untuk penanggung jawabnya yaitu kepada pihak sekolah, namun seringkali masyarakat malah memberi kritik kepada Wali Nagari, contoh lainnya dalam masalah pribadi atau kekeluargaan, pihak keluarga yang berselisih karena masalah warisan juga seringkali mengkritik Wali Nagari terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

Jika dikaji dengan tugas seorang Wali Nagari tentu hal ini sudah menyimpang, namun Wali Nagari Lakitan Tengah akan terus membantu dan mencari jalan keluar sebisanya, masyarakat diharapkan mengetahui dan memahami wewenang seorang Wali Nagari.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam bentuk skripsi “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten pesisir Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
2. Apa Saja Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
3. Untuk menemukan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Manajemen

Pendekatan atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Manajemen menurut Terry dan Lesly Manajemen merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³ Dan menurut Efendi Manajemen merupakan proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintahan dan sebagainya.

2.2 Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi manajemen yaitu Dessler:

a. Planning (Perencanaan)

Menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Untuk seorang manajer personalia perencanaan berarti menetapkan terlebih dahulu program personalia yang akan membantu tujuan perusahaan.

b. Organizing (Pengorganisasian) Mengadakan pembagian tugas atau struktur hubungan antara pekerjaan pengkelompokan tenaga kerja sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. controlling (Pengarahan) Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah ditetapkan, maka fungsi ini adalah sebagai pelaksanaannya seperti karyawan, melatih memikirkan suatu perangsang, hadiah atau sanksi kepada karyawan sesuai dengan prestasi kerja yang mereka raih.

d. Controlling (Pengendalian) Tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajer untuk melakukan pengamatan, penelitian, serta penilaian dari pelaksana seluruh

³ Terry.2006. Prinsip-prinsip Manajemen. PT,Bumi Aksa Hal 4

kegiatan organisasi yang sedang atau telah berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.3. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Fungsinya

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya, Hasibuan,. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja karyawan agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka mencapai sasaran-sasaran perusahaan, Suparyadi. Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi Handoko, Manajemen sumber daya manusia memfokuskan kepada manusia baik sebagai subjek atau pelaku sekaligus sebagai objek dari pelaku. Jadi, manajemen sumber daya manusia akan mengelola, melalui proses perencanaan (Planning), organisasi (Organizing), pengamatan (Directing), dan pengendalian (Controlling), agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan hasil yang maksimal, efisien, dan efektif Subekhi dan Jauhar.⁴

2.4. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.⁵

2.5. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang

⁴ Handoko 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup Hal 6

⁵ Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia., hal.119

diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus³. Dan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁶

2.6. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Metode Penelitian

3.1 Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada penelitian *deskriptif* kemudian ditunjang *kualitatif*. Penelitian *deskriptif* yaitu bentuk penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan agar data yang tersedia dan terkumpul dapat memberikan gambaran secermat mungkin tentang keadaan yang terjadi pada objek penelitian.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti. Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi "finit" dan populasi "infinif". Populasi finit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti diketahui, sedangkan populasi infinif adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti.⁷

Sesuai dengan pemahaman tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan dalam penelitian. Mengingat jumlah populasi maka seluruh populasi

⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang pedoman pengelolaan keuangan Nagari

⁷ Supardi, "Laporan Penelitian Populasi dan Sampel Penelitian". Unia, No 17 Tahun XIII Triwulan VI-1993. Hal. 101

tersebut dijadikan sebagai sampel tersebut. Dalam pengambilan sampel ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu saja artinya berapapun jumlah sampel yang akan ditetapkan nantinya mewakili keseluruhan populasi yang telah disebutkan diatas. Berdasarkan teknik *purposive sampling* akhirnya penulis menetapkan jumlah sampel adalah (Enam) orang yang penulis anggap sudah mewakili jumlah populasi yang telah disebutkan diatas.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data yang menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, dan data tersebut dapat dipercaya kebenarannya, dengan objek yang sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, kebenarannya perangkat instrumen sangat menentukan dalam pengumpulan data.

3.4 Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dimana semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan selanjutnya dipilih dan diklasifikasikan sesuai pokok-pokok permasalahan yang dibahas, sehingga data relevan dengan penulisan permasalahan ini diinterpretasikan dan dianalisa untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus, dengan kata lain pengertian yang umum menjadi khusus, data diperoleh dilapangan kemudian digabungkan atau disesuaikan dengan bahan yang akan diperoleh sewaktu mengadakan penelitian, sehingga pokok permasalahan dapat dilihat dengan jelas dan perbaikan atas masalah-masalah yang ditemui.

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti akan mencari data yang sesuai dengan apa yang berhubungan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan selama 1,5 (satu setengah bulan). Namun jika peneliti merasa ada data-data yang tidak lengkap maka peneliti dapat kembali ke lokasi penelitian untuk melengkapi data.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

4.1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan

1. Perencanaan Alokasi Dana

tahapan perencanaan, Nagari beranggapan bahwa penentuan prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini ditujukan untuk bisa

mengantisipasi jika di kemudian hari akan terjadi kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program-program yang telah disusun sebelumnya. Prosesnya musyawarah dalam tahap perencanaan itu makanya melibatkan semua masyarakat dan lembaga, setelah itu ada tim 11 (sebelas) yang akan menyusun dan mengakomodir dalam artian usulan-usulan dari seluruh masyarakat, setelah itu baru tim 11 memberikan susunan usulan ke Pemerintah Desa sehingga BPD. Usulan usulan itu diambil skala prioritas, contoh jika pembangunan yang menjadi skala prioritas adalah mana yang lebih baik dibang terlebih dahulu untuk tahun yang akan datang dan meminta meminta persetujuan.

2. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan serta DRK pengelolaan alokasi dana desa yang telah disusun dan disepakati berserta Lampiran-Lampiran dan kelengkapan Administrasi dan disampaikan kepada Wali Nagari.1. Alokasi Dana Desa dianggarkan pada APBD melalui belanja tidak langsung pada SKPD selaku BUD

2. Pemerintah Nagari membuka rekening atas nama Nagari
3. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat setempat dengan tembusan BPD
4. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud, Camat setempat melakukan verifikasi dan memberikan surat persetujuan pencairan ADD, paling lambat tiga hari kemudian untuk diteruskan ke BPMD.
5. Berdasarkan hasil verifikasi dan surat persetujuan pencairan ADD, BPMD melakukan verifikasi dan meneruskan permohonan beserta lampirannya kepada SKPKD selaku BUD
6. SKPKD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan melalui Bendahara Umum Daerah menyalurkan (mentransfer) ADD langsung dari kas daerah ke rekening Pemerintah Nagari.

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Nagari (ADN) telah menerima dana pada tiga termin dalam satu tahun anggaran 2017. Termin I Nagari telah menerima dana sebesar Rp 25.702.032 dengan total dari penggunaan dana desa pada Termin I adalah sejumlah Rp 24.708.000. Dana tersebut dipergunakan untuk operasional Pemerintah Nagari dan BPD, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian pada Termin II Nagari telah menerima dana sebesar Rp 33.414.660. Total dana tersebut telah dipergunakan untuk pembangunan fisik. Pembangunan tersebut memakan biaya sebesar Rp 33.414.660. Terakhir, pada Termin III Nagari Nagari menerima dana sebesar Rp 25.773.552. Dana tersebut dialokasikan dengan total penggunaannya adalah sebesar Rp 24.648.000. Dana tersebut telah dibagi untuk menjalankan operasional Pemerintah Nagari dan BPD, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Laporan yang dibuat pemerintah Nagari adalah SPJ yang kemudian setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan dengan wai Nagari, seluruh kepala kampung yang ada di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie dan masyarakat. jadi melaksanakan prinsip transparansinya adalah disitu, dengan memberikan informasi seluruh pengeluaran dalam satu bulan rutin dan kegiatan lainnya. Hanya saja tidak semua masyarakat turut hadir dan mengerti apa yang di SPJ kan.

4. Pengawasan

Pada tahapan pengawasan ini, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie sudah dianggap cukup mampu untuk menjalankan pengawasan dengan baik. Tahapan pengawasan telah dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi yang dilakukan secara terstruktur pada setiap tahapan Termin. bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tim dari Kabupaten, tetapi juga melibatkan Kepala kampung, tokoh masyarakat dan masyarakat yang aktif dalam Nagari walau tidak semua masyarakat ikut berkontribusi dalam pengawasan. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah dengan para aktor masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat turut serta mengawasi jalannya pengelolaan dana desa.

5. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Desa Nagari membuat laporan pertanggungjawaban yang dibagi menjadi tiga Termin dalam satu tahun anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Nagari juga telah melaksanakan pelaporan dengan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim Pelaksana Nagari sebagai pemegang amanah melakukan pelaporan secara berkala kepada Tim Pendamping Kecamatan yang kemudian Tim Pendamping Kecamatan akan merekap laporan dari Nagari lalu dikirim ke Bupati. Dalam hal pertanggungjawaban tentunya kami pihak dari wali Nagari tentu saja akan membuat laporan terlebih dahulu mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang

berada di Nagari Koto Nan Duo IV koto Hilie dalam hal itu kami akan melaporkan dalam 1 tahun sekali dan dalam hal pelaporan kami akan menyerahkannya kepada tim kecamatan.

4.2. Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

1. budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat

Budaya paternalistik yang melekat pada masyarakat sehingga mereka cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala kampung. Hal tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat tahu tentang adanya program pengelolaan alokasi dana desa tersebut dan juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu, dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana dianggap dapat menghambat kemandirian desa. Diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang ada juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa disetiap pos-posnya. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat Nagari dalam pelaksanaan kegiatan juga sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan budaya gotong royong masyarakat yang sangat baik, khususnya pada tahap pelaksanaan. Dengan diberdayakannya masyarakat melalui gotong royong secara tidak langsung pemerintah Nagari memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya agar kemudian tidak terjatuh ke dalam posisi yang lemah dan terpinggirkan.

2. Kendala Kelas Sosial

Adapun kendala yang terjadi dalam kelas social yaitunya memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat, masyarakat yang tergolong kelas atas biasanya akan lebih mudah memahami wewenang Wali Nagari sehingga mereka lebih mudah menerima informasi atau keputusan yang diberikan oleh Wali Nagari karena ditunjang oleh mereka yang memiliki pendidikan sehingga banyak sedikit akan lebih paham dengan dunia pemerintahan, berbeda dengan masyarakat kelas bawah apalagi dalam masalah ekonomi, sikap masyarakat yang

tidak memiliki rasa kepuasan terhadap bantuan yang telah didapat membuat mereka lebih gampang mengkritik Wali Nagari, namun dibalik kendala Kelas Sosial tidak menjamin perbedaan masyarakat dalam mengkritik pemerintahan Nagari, semua tergantung karakter masing-masing pribadi masyarakat, terkadang masyarakat yang sudah memiliki ekonomi yang cukup atau bahkan berlebih sering juga meminta bantuan-bantuan social kepada pemerintah Nagari, dan sikap dari sebagian yang tidak memiliki sifat berprasangka baik kepada Wali Nagari dimana mereka menaruh curiga dan tidak memiliki rasa kepercayaan kepada pemerintah Nagari sebagai Kepala Nagari yang ditugaskan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

3. Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Nagari

Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam berbagai bidang adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik ditingkat pimpinan dan perangkat nagari maupun seluruh lembaga nagari dan kelembagaan yang ada di Nagari Taluk. Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie dalam hal ini terlihat kurang profesional, dalam artian memberikan kepercayaan penuh terhadap perangkatnya dalam berbagai bidang. apalagi dalam pemberian bantuan kepada masyarakatnya. Wali Nagari kurang memantau aktifitas perangkatnya dan bersifat lebih acuh. perangkat nagari dalam melakukan tugas dan fungsinya.

2. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pegelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

1. Upaya dalam mengatasi budaya partenalistik yang masih melekat pada masyarakat

Dalam mengatasi upaya partenalistik yang masih melekat pada masyarakat tentunya tidak kan mudah tetapi selaku pihak Nagari tentu harus memberikan pengertian terhadap masyarakat, dalam hal itu tentunya pihak dari Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie harus memberikan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui program pengelolaan alokai dana desa yang berada di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie agar tidak ada kecurigaan atas program pengelolaan alokasi dana desa yang ada dalam nagari, dalam hal itu pihak nagari juga memintak kepada kepala kampung agar memberikan kepercayaan kepada masyarakat ikut serta dalam jalanya perencanaan yang akan di dilaksanakan dalam Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, tentang pengelolaan alokasi dana desa.

2. Upaya Kelas Sosial

Dalam upaya kelas social pemerintah Nagari telah mengupayakan memberikan pemahaman kepada masyarakat kelas ekonomi atas yang sudah memiliki ekonomi yang cukup jangan lagi mengharapkan bantuan apa-apa sehingga pemerintah Nagari lebih focus kepada masyarakat yang kelas ekonominya yang lebih rendah karena mereka memang layak untuk mendapatkan bantuan, hal lainnya yang menjadi upaya pemerintah Nagari juga menggunakan hasil pengolaan data yang sudah disurvey kerumah masing-masing masyarakat dimana dalam data tersebut aka nada golongan masyarakat yang ekonomi rendah dengan masyarakat yang memiliki ekonomi yang baik, sehingga jika ada bantuan social masyarakat yang kurang mampu akan terdata namanya dan juga mengurangi kritik yang akan ditujukan kepada Wali Nagari, namun perlu digaris bawahi bahwa ada pemerintah yang memiliki tingkatan diatas Wali Nagari yang tentunya pemerintah telah mengatur tugas yang harus dilakukan seorang Wali Nagari dan tidak boleh keluar dari aturan yang diberikan pemerintah Nagari, masyarakat sebenarnya perlu bersikap lebih teliti lagi terhadap kritikan yang akan disampaikan, lihatlah terlebih dahulu kritik tersebut pantas ditujukan kepada siapa dan ditanggung jawabkan oleh siapa, jika masyarakat tidak mencampur adukan masalah pemerintah dengan kehidupan pribadi mereka maka tentu ini akan otomatis meminimalisir kritikan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie.

3. Meningkatkan Transparansi dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Nagari

Transparansi terbukanya kesempatan bagi masyarakat nagari untuk dapat terlibat atau berpartisipasi dalam hal pengelolaan pendapatan asli nagari, seperti membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat ikut serta dalam rapat-rapat nagari sehingga disitulah masyarakat ikut bersuara untuk memberikan usulan, ide, gagasan beserta kritikan dan saran kepada wali nagari beserta stafnya. Serta pemerintah nagari juga dapat membuat baliho atau papan informasi tentang rencana pembangunan nagari agar masyarakat dapat melihat secara langsung kemana dana nagari itu akan dipergunakan dan akan direalisasikan

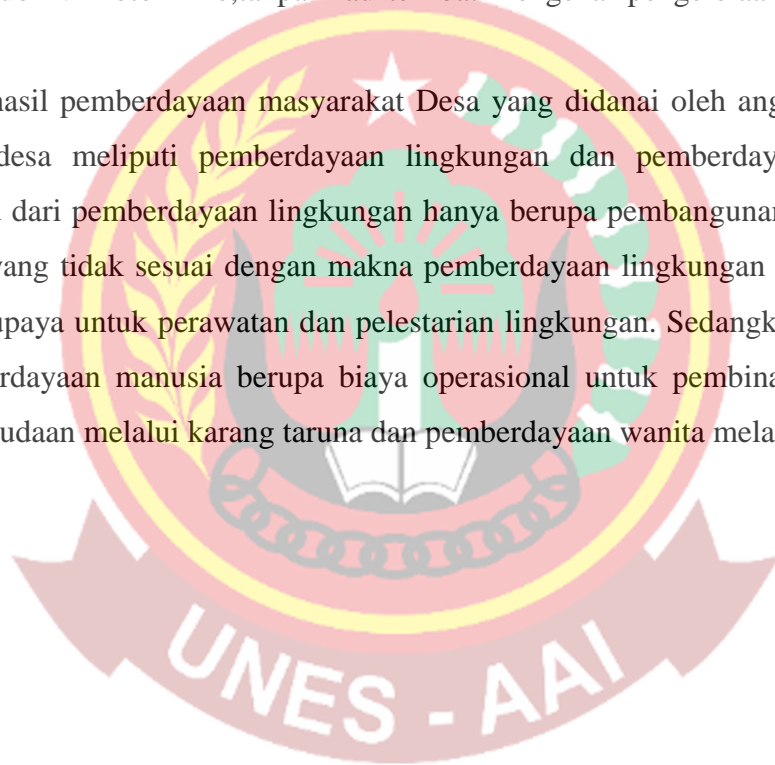
PENUTUP

2.2. Kesimpulan

1. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie secara normatif dan admistratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat

pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung- jawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut.

2. Kendala yang terjadi dalam hal budaya parternalistik dimana masyarakat hanya mengandalkan semuanya kepada kepala kampung dimana masyarakat tidak mau mengetahui tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Ada Dalam Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie,tanpa mau terlibat mengenai pengelolaan alokasi dana desa.
3. Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Desa yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Wujud dari pemberdayaan lingkungan hanya berupa pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan sesungguhnya yaitu upaya untuk perawatan dan pelestarian lingkungan. Sedangkan wujud dari pemberdayaan manusia berupa biaya operasional untuk pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan pemberdayaan wanita melalui PKK



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS EKASAKTI-AAI PADANG

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

H.A Rosid, 2002, *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah*, dalam Yaya M. Abdul Aziz dan Ade priangani (eds.), *Titik Balik Demokrasi dan Otonomi Pikiran-Pikiran Krisis di Saat Krisis*, Yogyakarta: Pustaka Raja.

Terry.2006.Prinsip-prinsip Manajemen.PT.Bumi Aksara

Handoko.2014.Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Lexi J. Maleong, 2001. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

3. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman pengelolaan keuangan Nagari

4. KARYA ILMIA/ INTERNET

<http://www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabbimkonkude sa.pdf>.